

LITERATUR REVIE: ANALISIS PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA

LITERATUR RIVIEW: ANALYSIS OF THE UTILIZATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE IN INDONESIA

Maria Anita Yusiana^{1*}, Destiar Devina Putri Nareswara¹, Yusita Sriwedari,¹

¹STIKES RS Baptis Kediri

*e-mail: yusianamaria@gmail.com

ABSTRAK

Mutu pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini telah melewati kesenjangan sosial dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional ini membayar fasilitas kesehatan secara prospektif sehingga hal ini dapat mengubah sistem kesehatan di Indonesia. JKN yang efektif dan efisien dapat melindungi masyarakat Indonesia dari biaya kesehatan yang tinggi. Tinjauan ini dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang masyarakat pengguna JKN dalam peningkatan derajat kesehatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan JKN di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan literatur review, Populasi jurnal sebanyak 11 jurnal dan 1 buku Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan dengan kata kunci Pemanfaatan JKN dan Masyarakat. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa pengguna JKN terbanyak berjenis kelamin perempuan (65%), berada pada usia 41-50 tahun (47%), tamat PT (30%), bekerja sebagai Petani dan Mahasiswa (25%) dan juga bahwa peserta JKN memiliki pengetahuan cukup tentang pemanfaatan JKN di Indonesia. Peserta yang memiliki sikap baik terhadap pemanfaatan JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan peserta yang tahu tentang persepsi terhadap JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan dan peserta yang menilai baik terhadap JKN cenderung sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. kepuasaan masyarakat di Indonesia mengetahui pemanfaatan JKN berdampak pada pelayanan kesehatan khususnya bagi pengguna JKN.

Kata kunci : Pemanfaatan JKN, Kesehatan Masyarakat

ABSTRACT

The quality of health services in Indonesia has now passed the social gap with the existence of the National Health Insurance program. This National Health Insurance pays for health facilities prospectively so that this can change the health system in Indonesia. An effective and efficient JKN can protect Indonesians from high health costs. This review can be carried out from various perspectives of the JKN user community in improving health status in Indonesia. The purpose of this study was to determine the benefits of JKN in Indonesia. This type of research uses a literature review, the population of journals is 11 journals and 1 book of Health Service Policy Analysis with the keywords Utilization of JKN and the Community. By using descriptive analysis. The results of this study show that the majority of JKN users are female (65%), are aged 41-50 years (47%), graduated from College (30%), worked as farmer and college student (25%) and also that JKN participants have sufficient knowledge about the use of JKN in Indonesia. Participants who have a good attitude towards the use of JKN tend to

frequently use health services. Likewise, participants who know about the perception of JKN tend to often use health services and participants who rate JKN favorably tend to use health services more often. the satisfaction of the people in Indonesia knowing that the use of JKN has an impact on health services, especially for JKN users.

Keywords: *Utilization of JKN, Community, patient satisfaction*

Pendahuluan

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, Upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat segera ditingkatkan. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 1024 dengan target cakupan kepesertaan sampai dengan akhir 2019. Pemanfaatan pelayanan kesehatan berhubungan erat dengan kapan seseorang memerlukan pelayanan kesehatan dan bagaimana aksesnya terhadap pelayanan kesehatan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan serta setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menerima Kesehatan Nasional Asuransi (JKN). JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang disahkan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Kepuasan pasien atau kepuasan masyarakat

pengguna JKN dapat dilihat dari jumlah responden pengguna JKN berjenis kelamin perempuan (65%), berada pada usia 41-50 tahun (47%), PT (38%), bekerja sebagai Petani dan mahasiswa (25%). Selain tentang responden kepuasan dalam pemanfaatan JKN juga terdapat peserta JKN memiliki pengetahuan cukup tentang pemanfaatan JKN di Indonesia. Peserta yang memiliki sikap baik terhadap pemanfaatan JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan peserta yang tahu.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan bahwa negara harus menerbitkan tentang JKN harus benar benar diperinci sehingga menjadi rencana kerja dan penetapan fokus utama dalam perlindungan sosial. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini merupakan suatu kemudahan yang memfasilitasi kegiatan sehari hari. Seluruh peserta jaminan kesehatan nasional dapat mengakses setiap layanan kesehatan melalui aplikasi.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Zakiah, 2018) Salah satunya upaya tersebut adalah kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dengan adanya JKN diharapkan masyarakat yang menjadi peserta akan terlindungi dari risiko penderitaan finansial ketika mengakses kebutuhan dasar pelayanan kesehatan.

Upaya ini juga dituangkan menjadi program prioritas Indonesia dalam

rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, hal ini menjadi titik awal peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar. JKN menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal karena pemanfaatan JKN di Indonesia ini sangat dibutuhkan guna untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian dengan menggunakan literatur review, populasi jurnal sebanyak 12 jurnal dengan menggunakan 1 buku dengan kata kunci pencarian JKN, kesehatan masyarakat, dan juga Pemanfaatan JKN bagi masyarakat di Indonesia menggunakan google scholar. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis bivariat untuk menganalisis kepuasan masyarakat terhadap JKN.

Hasil

Tabel 1. Distribusi Responden Pengguna JKN Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan.

Karakteristik Responden	Frekuensi Kepuasan Pemanfaatan JKN (n=100)	Proporsi (%)
Jenis kelamin		
- Laki laki	35	35
- Perempuan	65	65
Umur		
- 10 – 20 tahun	10	10
- 21-30 tahun	43	43
- 41 – 50 tahun	47	47
Pendidikan Terakhir		
- Tidak Sekolah	5	5
- Tamat SD	17	17
- Tamat SMP	28	28
- Tamat SMA	23	23
- Tamat PT	30	30
Pekerjaan		
- PNS	10	10
- Petani	25	25
- Wiraswasta	12	12
- Mahasiswa	25	25
- IRT (ibu rumah tangga)	20	20
- Lainnya	8	8

Berdasarkan Hasil penelitian berdasarkan literatur review pada Tabel.1 dapat dilihat dari segi jenis kelamin bahwa jurnal sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (65%), berada pada usia 41-50 tahun (47%), tamat PT (30%), bekerja sebagai Petani dan mahasiswa (25%). Dilihat dari segi umur, kisaran responden terbanyak yang memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu ada pada kelompok

umur 41-50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 47. Pekerjaan yang tertinggi adalah pada tabel yaitu kebanyakan responden yang berperan sebagai Petani dan mahasiswa yaitu dengan jumlah responden sebanyak 25%. Pada tingkat pendidikan, responden tertinggi yakni ada pada masyarakat dengan pendidikan hanya sebatas tamat PT dengan jumlah responden sebanyak 30%.

Tabel 2. Hubungan Tingkat Keeratan Pemanfaatan JKN Pada Masyarakat di Indonesia Dengan Variabel Pengetahuan, Sikap, Persepsi Terhadap JKN, Penilaian Terhadap JKN

Variabel	Pemanfaatan JKN				Jumlah	p-value	r
	Sering		Jarang				
	n	%	N	%			
Pengetahuan							
- Cukup	51	51	12	12	63	0,536	0,063
- Kurang	28	28	9	9	37		
Sikap							
- Baik	78	78	1	1	79	0,000	0,940
- Tidak baik	1	1	20	20	21		
Persepsi terhadap JKN							
- Tahu	69	69	18	18	82	0,007	0,270
- Tidak tahu	10	10	8	8	18		
Penilaian JKN							
- Baik	71	71	14	14	85	0,0008	0,265
- Kurang baik	8	8	7	7	15		

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa peserta JKN memiliki pengetahuan cukup tentang pemanfaatan JKN di Indonesia. Peserta yang memiliki sikap baik terhadap pemanfaatan JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan peserta yang tahu tentang persepsi terhadap JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan dan peserta yang menilai baik terhadap JKN cenderung sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah responden yang lebih mengarah pada hal yang positif terkait dengan adanya pemanfaatan program JKN yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan pada 10 jurnal yang telah dianalisis, sekiranya terdapat 8 jurnal (80%) mengenai pemanfaatan program JKN yang dilakukan oleh pasien untuk meningkatkan jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam jurnal Diva Indah Pratiwi, dkk; Ferdian Fadly, dkk (2019); M. Fais Satrianegara, dkk (2015); Heny Lestary, dkk (2019); Miftahul Hidayat; Desnel Natalia Lende, dkk (2021); Yeti Sukeni (2021); dan satu jurnal tanpa adanya identitas penulis.

Sedangkan 1 jurnal lainnya (10%) mengenai efektivitas dalam penerapan JKN melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan. Dan terdapat 1 jurnal yang membahas mengenai analisis kebijakan dalam pelayanan kesehatan.

JKN adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta dapat memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN yang dikembangkan di Indonesia saat ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang – Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN ini merupakan tata cara dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Jaminan Sosial dalam hal ini meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Jaminan Kesehatan di Indonesia secara nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan mulai melakukan kegiatan operasional mulai tanggal 1 Januari 2014 (Kementerian Kesehatan, 2014; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, 2019).

Menurut buku yang berisi mengenai pegangan sosialisasi JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan iuran yang memiliki sifat wajib bagi peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No 40 Tahun 2004). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem SJSN. SJSN ini diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang tentunya memiliki sifat wajib berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang baik dan layak.

Ada pula prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya prinsip *kegotongroyongan*; yang artinya peserta mampu membantu peserta lain yang kurang mampu dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Hal ini karena kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk tanpa pengecualian.
2. Adanya prinsip *Nirlaba*; yang artinya pada pengelolaan dana BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba.
3. Adanya prinsip *keterbukaan*, meliputi beberapa hal seperti

kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

4. Adanya prinsip *portabilitas*; yang dimaksud dalam prinsip portabilitas yaitu untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dan masih dalam lingkup wilayah NKRI.
5. Adanya prinsip kepesertaan bersifat wajib; yang artinya wajib bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk menjadi peserta JKN-BPJS.
6. Adanya prinsip *dana amanat*; yang mana artinya dana yang terkumpul berupa titipan kepada badan penyelenggara yang dikelola dengan sebaik-baiknya.
7. Yang terakhir adanya prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial.

Efektivitas dalam penerapan pemanfaatan JKN melalui BPJS dengan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain kualitas, penilaian oleh pihak luar, kesiagaan dalam melakukan pelayanan kesehatan, motivasi yang diberikan oleh para penyelenggara terhadap tenaga kesehatan, keluwesan adaptasi dan penerimaan tujuan organisasi. Dari beberapa indikator tersebut diketahui bahwa BPJS sebagai penyelenggara JKN cukup melakukan tanggungjawab kerja dengan baik sebab hasil penelitian dengan menggunakan kuisioner menunjukkan bahwa responden cukup memahami penggunaan JKN setelah mendapatkan penjelasan di kantor BPJS hal ini juga dibuktikan melalui data statistik yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara efektivitas penerapan JKN melalui BPJS dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Memang tidak bisa dipungkiri pula bahwa efektivitas organisasi BPJS membawa dampak yang baik dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin meskipun terdapat kelemahan-kelemahan

lain yang juga bersifat substantif seperti aspek keramahan tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan, kedisiplinan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya dan lain sebagainya.

Adanya pemanfaatan dalam program JKN dapat pula ditinjau dari jumlah kunjungan pasien di rumah sakit terkait pemanfaatan program JKN. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian jumlah kunjungan pasien di Rumah Sakit Yos Sudarso di Kota Padang yang mengalami peningkatan kunjungan pasien di poli gigi Rumah Sakit Yos Sudarso pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh karena lokasi rumah sakit yang cukup strategis sehingga pasien lebih memilih untuk dirujuk ke rumah sakit tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, didapat Jumlah kunjungan pasiendi poli gigi Rumah Sakit Yos Sudarso yang menggunakan JKN pada tahun 2014 mengalami peningkatan lebih banyak daripada pasien yang menggunakan asuransi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1570 kunjungan atau sebesar 45,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 44%. Hal ini telah membuktikan bahwa masyarakat telah memanfaatkan adanya program JKN dengan baik sehingga presentase pasien yang mendapat pelayanan kesehatan meningkat dan pasien tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses sebuah pelayanan kesehatan.

Di samping itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Riau dapat diketahui bahwa penelitian tersebut dilakukan untuk melihat adanya faktor lain yang dapat menghambat usaha pemerintah dalam mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Semakin tua umur maka kecenderungan menggunakan JKN semakin besar. Hal ini sejalan dengan Negash bahwa semakin tinggi usia kepala rumah tangga maka semakin besar kecenderungan untuk menggunakan

asuransi kesehatan. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan maka kecenderungan menggunakan JKN semakin kecil. Sedangkan status ekonomi memegang peranan penting dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Semakin miskin penduduk maka pilihan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan semakin terbatas. Dengan kata lain, penduduk yang lebih kaya punya pilihan lebih banyak untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan jaminan asuransi kesehatan.

Pada jurnal ke 6, dijelaskan mengenai gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada pasien rawat inap yang dilakukan di Puskesmas Batua Kecamatan Manggala di Kota Makassar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai program JKN terhadap pasien rawat inap di Puskesmas Batua menunjukkan adanya titik rendah di mana banyak masyarakat yang kurang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Menurut Depkes RI (2010) memaparkan bahwa pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh terbatasnya tenaga kesehatan milik pemerintah, keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat dan persepsi masyarakat. Ditinjau dari jenis kelamin, perempuan lebih cenderung banyak mengalami kesehatan dan tekanan dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Penelitian yang dikemukakan oleh Mujahidah (2013) mengungkapkan bahwa Jenis kelamin laki-laki sebesar 20 (23.3%) responden sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 66 (76.7%) responden. Dan jika ditinjau dari sisi umur, maka penelitian yang dikemukakan oleh Suriani (2004) memaparkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh umur yang merupakan faktor lain yang mengakibatkan masyarakat tidak memanfaatkan program JKN dengan baik. Faktor umur terlihat berperan penting menentukan kesinambungan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Teori yang dikemukakan oleh Syahlan (1996), menyebutkan bahwa keluarga yang berpendidikan rendah pada umumnya pasrah bila gangguan kesehatan menimpa anggotanya. Mereka akan meminta bantuan bila masalah kesehatan sudah berat, sehingga pencarian upaya kesehatan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hermanto (2009) memaparkan bahwa Responden yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dibanding responden yang berpendidikan yang rendah. Secara teoritis pendidikan formal akan sangat mempengaruhi pengetahuan sehingga apabila seseorang mempunyai pendidikan formal tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi serta wawasan yang luas dibandingkan dengan seseorang dengan pendidikan rendah pada analisis ini hanya membahas pendidikan formal dan seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan lebih cepat dan lebih mudah memahami pentingnya kesehatan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 1993).

Dari segi pekerjaan, seseorang yang tidak bekerja cenderung lebih berpeluang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan karena tidak terlalu mempunyai kesibukan dalam hal pekerjaan, sedangkan yang bekerja terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan terkadang kesehatannya pun tidak terlalu diperhatikan sehingga tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada maupun yang terdekat dan bisa dijangkau. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Evi Febrianty Sugino (2013), memaparkan bahwa pekerjaan yang paling banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan yaitu petanid mahasiswa sebanyak 25 responden (25%) dan yang paling sedikit adalah lainnya yaitu sebanyak 8 (8%) responden. Hal ini menunjukkan, mau tinjau dari segi manapun baik dari segi jenis kelamin, umur, pendidikan, serta pekerjaan, seseorang akan tergantung pada persepsinya masing-masing

mengenai bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diselenggarakan oleh BPJS.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dengan indikator adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada awal pelaksanaan JKN, jumlah PBI yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 86,4 juta jiwa dengan banyaknya anggaran yang diperoleh sebesar Rp 19,93 triliun dan meningkat menjadi 96,8 juta jiwa atau sebesar Rp 26,71 triliun di tahun 2019. Sampai dengan bulan Mei 2019, jumlah peserta PBI yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebesar 96,6 juta jiwa atau 99,79% dari total target yang ditetapkan (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, 2019). Jaminan Kesehatan Nasional bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Tidak hanya orang-orang dengan penyakit serius dan menular yang bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun Ibu hamil dan juga bersalin menjadi salah satu sasaran utama fokus pembangunan kesehatan seharusnya ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan. Hingga pertengahan tahun 2019, pemerintah telah menggelontorkan dana trilyunan rupiah melalui program Jaminan Persalinan. Dampak positif dari adanya asuransi kesehatan bagi ibu adalah ibu lebih konsisten dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk tempat persalinan daripada tempat pemeriksaan kehamilan (Wang, Tamsah and Mallick, 2017).

Rancangan kebijakan dalam pemanfaatan JKN dan implementasi program JKN menunjukkan kemajuan yang pesat. Program ini berhasil menggeneralisasi manfaat yang sebelumnya bervariasi di antara berbagai skema jaminan sosial di Indonesia. Program JKN menawarkan manfaat yang

komprehensif, mulai dari penanganan penyakit infeksi hingga penyakit yang memerlukan intervensi mahal, seperti terapi jantung, cuci darah dan kanker (Situmorang H C, 2016). Determinan dari pemanfaatan JKN dapat dilihat dari adanya faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Faktor lingkungan, meliputi Sistem Pelayanan Kesehatan dan Faktor eksternal (Teknologi)
2. Faktor karakteristik populasi, meliputi Karakteristik predisposisi, Sumber daya pemungkin dan Faktor kebutuhan
3. Faktor perilaku kesehatan
4. Faktor keluaran

Tingkat pemanfaatan JKN juga bisa mengalami penurunan dengan adanya faktor di atas. Jika dilihat dari faktor di atas, dapat mempengaruhi perubahan sistem pelayanan kesehatan. Hal ini dapat memicu perubahan alur dari pelayanan kesehatan seperti adanya perubahan pada jam pelayanan, perubahan pada demografi pada masyarakat yang membutuh pelayanan kesehatan, serta perubahan penggunaan teknologi juga ikut terpengaruh.

Dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yakni di puskesmas, puskesmas dalam sistem JKN/ BPJS memiliki peran yang besar kepada peserta BPJS kesehatan. Apabila pelayanan puskesmas yang diberikan baik maka akan semakin banyak peserta BPJS yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, namun dapat terjadi sebaliknya jika pelayanan dirasakan kurang memadai maka akan banyak orang yang mengabaikan kesehatan mereka akibat dari adanya pelayanan yang kurang memuaskan (Hasbi 2012). Permasalahanklasik yang sering timbul di Puskesmas di mana pelayanan kesehatan dilakukan adalah berupa ketersediaan tenaga kesehatan yang kurang serta kelengkapan obat yang belum memadai, ditambahkan pula dengan sikap dan perilaku petugas kesehatan terhadap pasien. Terkadang hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien belum

tercipta secara baik menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Hal tersebut banyak mempengaruhi minat masyarakat khususnya peserta BPJS kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas (Alamsyah, 2011) dalam (Jikmu, 2015). Untuk itu, tenaga kesehatan harus mendapat pelatihan dan pengembangan diri agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada masyarakat.

Untuk itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kondisi sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting yang dianggap sangat mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Sarana prasarana yang disediakan harus menjamin faktor kenyamanan, kebersihan, obat yang diberikan dan juga informasi tentang pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN wajib disediakan oleh pihak puskesmas. Semakin baik sarana dan prasarana yang disediakan, maka masyarakat akan cenderung untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Oleh karena itu, dalam pelayanannya puskesmas diharapkan perlu mengintervensi beberapa hal untuk mengembangkan pelayanan kesehatan di masyarakat, diantaranya adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan yang diberikan dan juga meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya seperti ketersediaan air bersih, peralatan yang digunakan, fasilitas kesehatan di daerah pelosok dan kebersihan yang sudah dinilai baik dan layak oleh masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, yang tadinya masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, utuh, dan layak, kini masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tersebut di mana saja dan kapan saja. Pemanfaatan JKN cenderung dilakukan

oleh peserta yang memiliki sikap baik dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan peserta yang tahu tentang persepsi terhadap JKN cenderung untuk sering memanfaatkan pelayanan kesehatan dan peserta yang menilai baik terhadap JKN cenderung sering memanfaatkan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah responden yang lebih mengarah pada hal yang positif terkait dengan adanya pemanfaatan program JKN yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, ada pula beberapa hambatan yang menghalangi usaha pemerintah dalam meningkatkan program JKN di Indonesia. Diantaranya seperti umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Untuk itu, antara tenaga kesehatan dan masyarakat harus memiliki hubungan yang baik agar tercipta lingkup pelayanan kesehatan yang baik, sehat, dan sejahtera untuk memajukan dan meningkatkan manfaat program JKN.

Daftar Pustaka

- Desnel, N, L,dkk. (2021). *Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja Puskesmas Tarus*. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat. Vol. 3. No. 1. <https://drive.google.com/file/d/1Y8k7rbp5OzaxVyBHrF1Hfe2SMnDqGGI/view> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 08.02 WIB
- Dewi, A. (2022). *Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pkl: 17.28 WIB
- Diva, I, P,dkk. (2019). *Perbandingan Kunjungan Pasien Per Kasus di Pelayanan Kesehatan Gigi Lanjutan Pada Rumah Sakit di Kota Padang Ditinjau dari Pemanfaatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Jurnal Dental Andalas. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pkl: 16.02 WIB
- Ferdian, F,dkk. (2019). *Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 di Provinsi Riau*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 8. No. 4. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pkl: 19.56 WIB
- Heny, L,dkk. (2019). *Pemanfaatan Jaminan Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu di Tujuh Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Ekologi Kesehatan. Vol. 18. No. 2. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 09.40 WIB
- Marina, E, S,dkk. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Berjenjang dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 8. No. 1. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 07.17 WIB
- Miftahul, H. (2021). *Pemanfaatan BPJS Kesehatan Pada Layanan Kesehatan*. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret pkl: 09.11 WIB
- M. Fais, S,dkk. (2015). *Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada Pasien Rawat Inap di Puskesmas Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar 2015*. Jurnal Public Health Science. Vol. 7. No. 2. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdMIYLjPvgnrHdSf>

- [ers/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf](https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf) diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 10.13 WIB
- Nora Eka Putri. (2014). *Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang*. Jurnal Penerapan JKN Melalui BPJS. Vol. 10. No.2. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 21.36 WIB
- Pemanfaatan BPJS Kesehatan Pada Layanan Kesehatan*. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 08.47 WIB
- Shita Dewi. (2016). *Sekilas Gambaran Pelaksanaan JKN*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Vol. 5. No. 3. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf> diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pkl: 08.28 WIB
- Yeti, S,dkk. (2021). *Determinan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan di masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol. 4. No. 4. <https://drive.google.com/drive/folders/1roelUATDRqEcAOtRCdM1YIjVgnrHdSf> diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pkl: 17.43 WIB.